

## KATA PENGANTAR

Terselenggaranya **Good Governance** merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar sebagai perangkat daerah yang transparan dan akuntabel

Batusangkar, Januari 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KEPALA PELAKSANA,

THAMRIN, ST  
NIP. 19660107 199403 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI .....	1
B. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH.....	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
<b>BAB II PERENCANA DAN PERJANJIAN KERJA.....</b>	<b>8</b>
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018....	8
C. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018 .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	11
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	15
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>17</b>
A. KESIMPULAN .....	17
B. SARAN.....	17

## DAFTAR TABEL

	Hal
1. KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN.....	2
2. KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN.....	3
3. KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	3
4. SARANA DAN PRASARANA.....	4
5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018.....	8
6. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018.....	9
7. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 .....	14
8. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	15

**A.    PENJELASAN UMUM ORGANISASI****1. Kewenangan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan menyelenggarakan perumusan dan penetapan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**2. Tugas Pokok**

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah secara berkala dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mengkoordinir tenaga relawan.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas kewenangan daerah diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Fungsi :

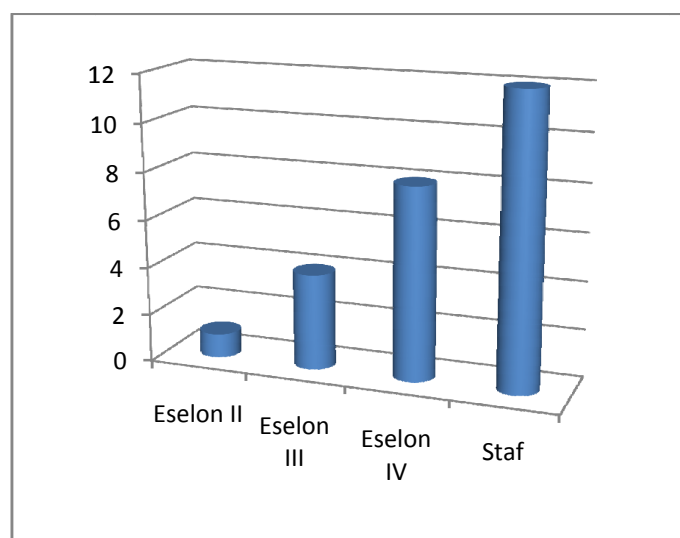
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### 4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 Nomor 5 seri D) ditetapkan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

- 1). Komposisi pegawai berdasarkan jabatan :

**Tabel. 1**  
**Komposisi pegawai berdasarkan jabatan**



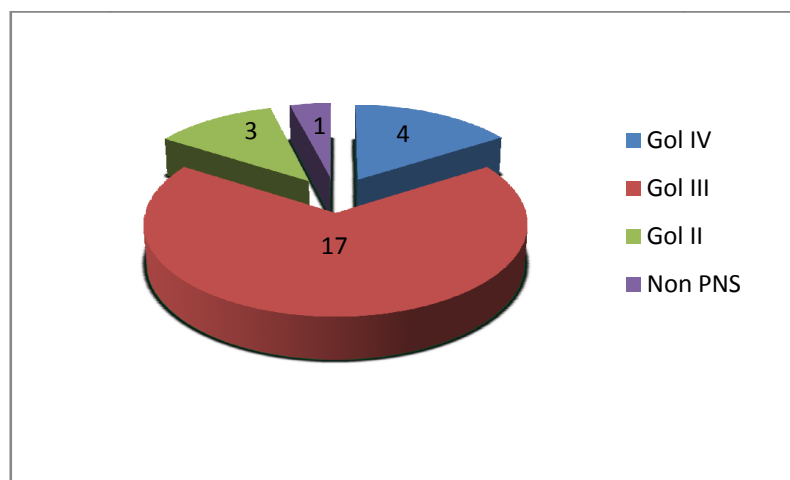
- 2). Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan sebagai berikut :

Susunan kepegawaian pada BPBD Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan dalam bezzeting pegawai dengan jumlah 25 orang, yang terdiri dari 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 Orang Non PNS.

Berdasarkan komposisi kepangkatan dapat dibedakan sebagai berikut:

**Tabel. 2**

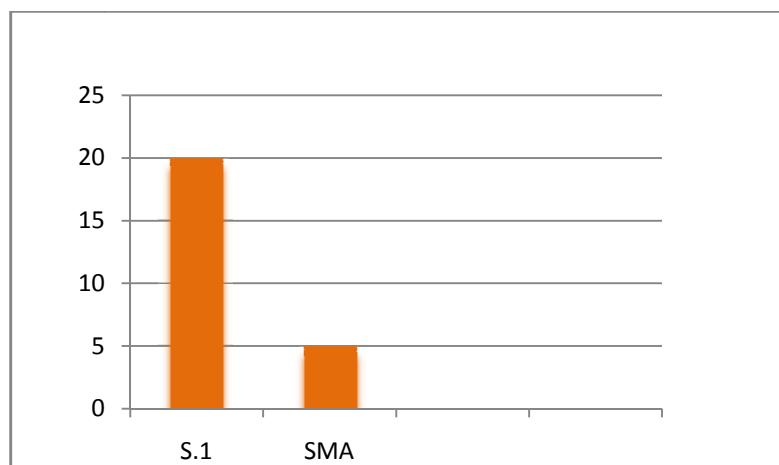
**Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan**



- 3). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel. 3**

**Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan**



5. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 4**

**Sarana dan prasarana**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah ( Unit )</b>
1.	Mobil dinas roda 4	3
2.	Mobil Rescue	1
3.	Mobil Pemadam Kebakaran	6
4.	Mobil Dapur Lapangan	1
5.	Mobil Truk Serbaguna	1
6.	Mobil Ambulans	1
7.	Sepeda Motor Trail	6
8.	Sepeda Motor	3
9.	Perahu Karet	3
10.	Handy Talky	15
11.	RIG	7
12.	SSB	1
13.	Water Treatment Fortable Machine	1
14.	Tenda Posko	3
15.	Tenda Pleton	2
16.	Tenda Regu	3
17.	Tenda Keluarga	10
18.	Tenda Sekolah	1
19.	Tenda DUM	10
20.	Tenda Summer Time $\frac{3}{4}$	3
21.	Tenda Komando Lapangan	4
22.	Genset	5
23.	Velbed	30
24.	Lampu HID	1
25.	Chainsaw	4
26.	Personal Computer	8
27.	Note Book	11
28.	Printer	4
29.	Modem	1
30.	Telepon	3



<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah ( Unit )</b>
31.	Faximile	2
32.	CCTV	1
33.	Televisi	2
34.	GPS	4
35.	Kompas	7
36.	Wind Flow	1
37.	Pelampung	10
38.	Tandu Basket	6
39.	Teropong Binocular	1
40.	Peralatan evakuasi	3
41.	American Scuba (Tabung Oksigen)	2
42.	Petal/Croll	1
43.	Cressi/Bed	1
44.	Regulator Seat Pysindro	1
45.	Octopuis	1
46.	Console 2 Seat	1
47.	Wet Suit	1
48.	Fin Amscud Sigma	1
49.	Bootis Amscud Chalange	1
50.	Fin Cressi Fog	1
51.	Bootis Cressi Minorca	1
52.	Pisau Cressi Vigo	1
53.	Tas Cressi Jungle	1
54.	Mesin Pompa Air	2
55.	Pelampung Pompa Air	2
56.	Tiang + Lampu Penerangan	
57.	Perahu Politelin	2
58.	Tenda Pengungsi	2
59.	Mesin Perahu Tempel	5
60.	Mesin Absensi	1
61.	UPS	1
62.	Harddisk eksternal	1
63.	Telepon PABX	1

## B. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pegunungan, perbukitan, lembah dan dataran tinggi yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunungapi marapi, tanah longsor, banjir bandang/galodo dan angin puting beliung/angin badai serta bencana kebakaran, baik pemukiman penduduk maupun lahan/hutan.

Dengan topografi daerah yang berbukit dan berlembah tersebut mengakibatkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap kejadian bencana tersebut. Untuk itu sangat tepat sekali dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, sehingga apabila terjadi bencana akan segera ditangani secara cepat dan tepat sehingga kerugian baik harta benda maupun jiwa dapat diminimalisir dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

## C. SISTEMATIKA PENULISAN.

Untuk menggambarkan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2018, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) BPBD tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisikan berupa Latar Belakang disusunnya LAKIP dan TAPKIN, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Lingkungan Strategis yang berpengaruh serta Sistematika Penulisan.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada BAB ini berisikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kerja tahun 2018

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB ini berisikan uraian Analisis capaian kinerja tahun 2018 dan realisasi keuangan.

#### BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan ringkasan berupa kesimpulan dan saran atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan penetapan kinerja tahun 2018 untuk perbaikan dan menuju arah yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.

Kalau kita mereviu kembali Program/Kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari awal RPJMD (tahun 2016), maka seluruh Program / Kegiatan tersebut diharapkan tetap berlanjut dan berkesinambungan sampai akhir periode RPJMD yaitu tahun 2021, sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditargetkan pada awal periode RPJMD akan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2021.

### B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018

**Tabel. 5**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketangguhan masyarakat nagari dalam menghadapi bencana	Persentase nagari siaga bencana	9,38 %
2.	Meningkatnya kecepatan/respon penanganan kedaruratan bencana	Respon time	24 jam
3.	Terwujudnya pemulihan infrastruktur yang rusak pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	40 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Hasil penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	BB

### C. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018

**Tabel. 6**  
**Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketangguhan masyarakat nagari dalam menghadapi bencana	Persentase nagari siaga bencana	9,38 %	<b>Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b> 1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam 2 Pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana 3 Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencanaan 4 Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana) 5 Penyusunan data base dan peta kawasan rawan bencana 6 Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan	Rp. 37.744.000 Rp. 87.008.000 Rp. 70.270.000 Rp. 64.598.000 Rp. 185.590.000 Rp. 29.588.800
2.	Meningkatnya kecepatan respon penanganan kedaruratan bencana	Respon time	24 Jam	1 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam 2 Fasilitasi potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Rp. 94.850.000 Rp. 400.059.300

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
3.	Terwujudnya pemulihan infrastruktur yang rusak pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	40 %	<b>Program Penanganan dan Rekonstruksi pasca bencana alam</b> 1 Pendataan dan inventarisir dampak pasca bencana alam  2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan PDNA)	Rp. 63.593.400   Rp. 26.722.400 Rp. 46.808.000

## BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 :

***“Meningkatnya ketangguhan masyarakat nagari dalam menghadapi bencana”***

Indikator Kinerja : Persentase nagari siaga bencana

Ada beberapa kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam  
Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan menyebarluaskan informasi bencana alam yang outputnya adalah tersusunnya dokumen pemantauan potensi bencana alam yang dapat dijadikan acuan bagi aparaturnya penyelamat kebencanaan serta masyarakat nagari dalam memahami potensi bencana yang ada di sekitar wilayahnya masing masing
2. Pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana.  
Kegiatan ini berupa sosialisasi kebencanaan bagi masyarakat nagari dan pemerintahan nagari serta sharing informasi kebencanaan
3. Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencanaan.  
Setiap tahun BPBD Kabupaten Tanah Datar mengadakan kegiatan pelatihan kebencanaan bagi satgas nagari dan juga mengikuti jambore pengurangan risiko bencana sebagai salah satu wadah peningkatan pengetahuan kebencanaan bagi satgas nagari dan aparaturnya penyelamat kebencanaan
4. Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan mengadakan simulasi penanganan bencana. Pada tahun 2018 kegiatan ini berupa simulasi penanganan bencana gempa bumi yang diikuti oleh semua unsur masyarakat nagari

5. Penyusunan data base dan peta kawasan rawan bencana  
Kegiatan penyusunan data base dan peta kawasan rawan bencana bertujuan untuk menyusun data base kebencanaan serta peta kawasan rawan bencana. Dokumen ini sangat penting untuk kegiatan mitigasi bencana
6. Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan  
Setelah penyusunan data base, penyusunan rencana kontijensi pun dilakukan guna merencanakan kontijensi kebencanaan

Sasaran 2 :

***“Meningkatnya kecepatan respon penanganan kedaruratan bencana”***

Indikator Kinerja : Respon time

Ada 2 (dua) kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini yaitu :

1. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam  
Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi peralatan peralatan kebencanaan baik itu peralatan kebencanaan perorangan, maupun peralatan kebencanaan kelompok. Peralatan kebencanaan ini sangat perlu dilengkapi guna meningkatkan kesiapan dan kecepatan respon aparaturnya penyelamat kebencanaan dalam penanganan kedaruratan bencana. Dalam kondisi darurat, peralatan peralatan kebencanaan diharapkan bisa difungsikan secara optimal sehingga penanganan kedaruratan bencana bisa berjalan lancar
2. Fasilitasi potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana  
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja petugas Pusat Pengendali Operasional – Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB), meningkatkan kecepatan respon penanganan kedaruratan bencana.



Sasaran 3 :

***“Terwujudnya pemulihan infrastruktur yang rusak pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi”***

Indikator Kinerja : Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana

Terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini yaitu :

1. Pendataan dan inventarisir dampak pasca bencana alam  
Kegiatan ini berupa pendataan dan inventarisasi terhadap bencana alam yang terjadi yang melahirkan dokumen pendataan sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan  
Kegiatan ini berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kejadian bencana serta membuat laporan monitoring dan evaluasi.
3. Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan PDNA)  
Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen pengkajian dan penghitungan pasca bencana. Dokumen ini sangat diperlukan untuk pengajuan proposal kebencanaan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana

**Tabel. 7**  
**Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2016)	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase nagari siaga bencana		6,25%	6,25%	9,38%	6,25%	6,25%	9,38%	100%	100%	100%
2	Respon time		24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	100%	100%	100%
3	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana		20%	30%	40%	20%	30%	40%	100%	100%	100%
	Rata-rata										

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

**Tabel. 8**  
**Akuntabilitas Keuangan.**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Capaian (%)		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya ketangguhan masyarakat nagari dalam menghadapi bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	286.507.500	303.422.000	474.798.800	206.598.800	277.550.800	467.992.200	72,1 %	91,4 %	98,5 %
		1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	36.150.000	46.512.000	37.744.000	19.516.200	44.056.300	37.590.000	54 %	94,7 %	99,6 %
		2 Pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana	97.600.000	94.855.000	87.008.000	83.404.900	78.227.000	85.558.000	85,5 %	82,5 %	98,3 %
		3 Peningkatan SDM kelembagaan dan aparatur penyelamat kebencanaan	37.000.000	50.000.000	70.270.000	33.579.700	49.442.500	69.492.500	90,8 %	98,9 %	98,9 %
		4 Gladi posko/gladi lapangan (simulasi penanganan bencana)	55.000.000	44.795.000	64.598.000	41.685.000	42.367.000	62.015.300	75,8 %	94,6 %	96 %
		5 Penyusunan database dan peta kawasan rawan bencana	35.035.000	31.260.000	185.590.000	22.070.000	29.067.000	184.730.400	63 %	93 %	99,5 %
		6 Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan	25.722.500	36.000.000	29.588.800	6.434.000	34.391.000	28.576.000	25 %	95,5 %	96,6 %

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Capaian (%)		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatnya kecepatan respon penanganan kedaruratan bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	610.453.000	459.604.000	494.909.300	550.078.525	454.187.945	486.412.945	90,1 %	98,8 %	98,2 %
		1 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	237.733.000	73.000.000	94.850.000	237.733.000	62.405.000	94.630.000	100 %	85,4 %	99,8 %
		2 Fasilitasi potensi masyarakat dan penanggulangan bencana dan penyelamatan	372.720.000	386.604.000	400.059.300	312.345.525	365.337.240	391.782.945	83,8 %	94,5 %	97,9 %
3	Terwujudnya pemulihan infrastruktur yang rusak pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam	1.643.112.100	3.791.707.862	137.483.800	1.214.320.625	3.311.639.549	131.728.856	73,8 %	87,3 %	95,8 %
		1 Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi	1.574.241.000	895.000.000	0	1.149.532.625	712.580.404	0	73 %	79,6 %	0
		2 Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan	0	1.904.321.687	0	0	1.821.501.023	0	0	95,7 %	0
		3 Rehabilitasi dan rekonstruksi sungai	0	837.186.175	0	0	665.806.014	0	0	79,5 %	0
		4 Pendataan dan inventarisasi dampak pasca bencana	0	75.000.000	63.953.400	0	43.450.081	60.503.756	0	57,9 %	94,6 %
		5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	35.589.500	39.500.000	26.722.400	34.807.000	36.969.200	25.253.400	97,8 %	93,6 %	94,5 %
		6 Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan PDNA)	33.281.600	40.700.000	46.808.000	29.981.000	31.332.827	45.971.700	90,1 %	77 %	98,2 %

## **BAB. IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN.**

Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) serta semua dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 telah berjalan dengan baik, realisasi keuangan yang dicapai adalah 86,54% sedangkan realisasi kinerja menurut sasaran dan program/kegiatan adalah sebesar 99,66%. Dari hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua program/kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

### **B. SARAN.**

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2018, masih perlu dilakukan penambahan anggaran untuk pencapaian kinerja dan pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat yang terkena bencana.

Akhirnya kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 ini tidak terlepas dari partisipasi, dukungan dan kerjasama dari semua staf BPBD Kabupaten Tanah Datar serta dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Oleh sebab itu demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang kami menerima masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Atas segala bimbingan,

arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut, akhirnya kami ucapkan terima kasih.

Batusangkar, Januari 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KEPALA PELAKSANA,

THAMRIN, ST  
NIP. 19660107 199403 1 004